

**KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA**
*(Studi di Desa Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip,
Kabupaten Tanggamus)*

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos) dalam Ilmu
Ushuludin dan Studi Agama**

OLEH :

EDO DEFRIAN RAMADHON

NPM : 1731040068

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA**
*(Studi di Desa Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip,
Kabupaten Tanggamus)*

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat**
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos) dalam Ilmu
Ushuludin dan Studi Agama**

OLEH :

EDO DEFRIAN RAMADHON
NPM : 1731040068

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.I.P

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023

ABSTRAK
KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA
DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA
(Studi di Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus)

Oleh
Edo Defrian Ramadhon

Kebutuhan akan tersedianya informasi merupakan kebutuhan mendasar di era sekarang ini baik sebagai individu maupun bagi setiap organisasi, termasuk didalamnya pemerintahan pekon. Kapasitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan pekon. Ketersediaan alat penunjang yang dimiliki oleh pekon semestinya dapat dimanfaatkan dengan baik, supaya segala macam informasi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dapat tersedia dan dapat mudah diakses kapan dan dimanapun berada. Sistem informasi yang digunakan berfokus pada sistem informasi berbasis komputer (*computerbased information system*) dengan tujuan : informasi yang di hasilkan tersebut dapat lebih akurat, berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Burhan Bungin, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi suatu objek penelitian, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau variabel tertentu. Peneliti akan berusaha untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi yang berkaitan. Sedangkan apabila ditinjau dari objek yang akan diteliti, penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan turun secara langsung untuk melakukan penelitian mengenai kapasitas implementasi pelaksanaan sistem informasi oleh perangkat desa di pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan aplikasi Sistem Informasi Desa, yaitu: Sumber Daya

Manusia (SDM) infrastruktur dan kesiapan teknologi. Sumber daya manusia dalam hal ini tertuju pada kurangnya operator komputer di pemerintahan pekon. Sedangkan untuk infrastruktur, yakni jaringan telekomunikasi yang belum tercukupi dan untuk faktor kesiapan teknologi, yaitu belum semua orang siap dengan adanya teknologi yang diterapkan. Untuk itu diperlukan edukasi dan penambahan Sumber daya manusia dalam peningkatan, serta optimalisasi dari Sistem Informasi Desa (SID). Sampai dengan saat ini, ketersediaan komputer yang ada di balai pekon belum disinergikan dengan kepemilikan *webbsite* resmi yang dimiliki oleh pekon serta tersedianya jaringan internet yang memadai. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kapasitas aparatur pekon yang ada di pekon Banjar Agung secara umum dapat kita lihat dari segi sumber daya manusia, pelatihan, keterampilan, sarana prasarana serta penyampaian informasi publik terhadap masyarakatnya sudah cukup baik. Sedangkan kapasitas aparatur pekon secara khusus yang melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID) melalui *webbsite* tidak sangat baik, dikarenakan tidak ada sumber daya manusia aparatur yang terlatih dan bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakannya disamping tidak tersedianya sarana pendukung seperti perangkat lunak serta jaringan internet seperti wifi yang dimiliki oleh pemerintah pekon.

Kata Kunci: *Kapasitas Pemerintahan Desa, Pengelolaan Sisten Informasi Desa.*

ABSTRACT
VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY
IN MANAGING VILLAGE INFORMATION SYSTEMS
(Study in Pekon Banjar Agung, Gunung Alip District,
Tanggamus Regency)

By
Edo Defrian Ramadhon

The need for the availability of information is a fundamental need in today's era both as an individual and for every organization, including the village government. Human resource capacity is very important in organizing and managing pekon government affairs. The availability of supporting tools owned by the pekon should be utilized properly, so that all kinds of information needed by citizens can be available and can be easily accessed anytime and anywhere. The information system used focuses on a computer-based information system (computerbased information system) with the aim: the information produced can be more accurate, quality, effective, efficient, transparent and accountable.

This research includes research using a qualitative research approach model. As explained by Burhan Bungin, qualitative research aims to describe, summarize various conditions, situations, or variables that arise in society which are the object of research, then draw them to the surface as a characteristic or description of certain conditions, situations or variables. Researchers will try to describe, summarize various related conditions and situations. Meanwhile, when viewed from the object to be studied, this research is included in field research, where researchers will go down directly to conduct research on the implementation capacity of the implementation of information systems by village officials in Banjar Agung pekon, Gunung Alip sub-district, Tanggamus district.

There are several factors that cause the implementation of the Village Information System application to not be optimal, namely: Human Resources (HR) infrastructure and technology readiness. Human resources in this case focus on the lack of computer operators in the pekon government. As for infrastructure, namely the

telecommunications network that has not been fulfilled and for the technology readiness factor, namely not everyone is ready for the technology applied. Therefore, education and additional human resources are needed to improve and optimize the Village Information System (SID). Until now, the availability of computers in the pekon hall has not been synergized with the ownership of an official website owned by the pekon and the availability of an adequate internet network. Thus, from the results of this research, it is found that the capacity of the pekon apparatus in Banjar Agung pekon in general can be seen in terms of human resources, training, skills, infrastructure and delivery of public information to the community is quite good. While the capacity of the pekon apparatus specifically implementing the Village Information System (SID) through the webbsi

Keywords: Village Government Capacity, Village Information System Management.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDO DEFRIAN RAMADHON**
NPM : 1731040068
Program studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul **Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa (Studi di Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip KabupatenTanggamus)** adalah orisinil hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2023
Penulis,



Edo Defrian Ramadhon
NPM 1731040068



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA
(Studi di Pekon Banjar Agung, Kecamatan Gunung
Alip, Kabupaten Tanggamus)
Nama : EDO DEFRIAN RAMADHON
NPM : 1731040068
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah di Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 1975031720031210003


Drs. Agustamsyah, M.I.P
NIP. 196001041994031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam


Abdul Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa (Studi di Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip KabupatenTanggamus)** Disusun Oleh, **Edo Defrian Ramadhon**, Npm: **1731040068**, Program Studi: **Pemikiran Politik Islam**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Uin Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. SUHADI.M.Ag

Sekretaris : DWI ROSMAWATI,S.Tr.Keb.,M.Kes

Penguji I : ABD. QOHAR, M.Si

Penguji II : Dr. ALI ABDUL WAKHID, M.Si

Penguji III : Drs. AGUSTAMSYAH, M.I.P

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
DAN STUDI AGAMA



Dr. Ahmad Isnaeni, M.A

NIP. 197403302000031001

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya, kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, dan cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Teruntuk Bapakku Erwinardo sebagai sosok yang sangat mendukung anak-anaknya dalam menempuh pendidikan, dan senantiasa ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang berbakti dan bermanfaat untuk orang lain. Ibuku Dede Kurniasih yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberi kasih sayang kepada ku. Berkat doa restu dan kerja keras dari kedua orang tuaku, sehingga aku dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga segala ilmu yang saya dapatkan dapat berguna untuk orang lain.




RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama Edo Defrian Ramadhon merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Erwinardo dengan Ibu Dede Kurniasih. Penulis lahir di Pringsewu, pada tanggal 05 Januari Tahun1999.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu dimulai pada tahun 2005 penulis memulai pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gisting dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Gisting lulus pada tahun 2017.

Rasa syukur Alhamdulillah pada tahun yang sama penulis dapat melanjutkan studi di Perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada prodi Pemikiran Politik Islam dan diselesaikan pada tahun 2023.



Bandar Lampung, April 2023
Penulis,

Edo Defrian Ramadhon
NPM 1731040068

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan menempuh syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak baik yang bersifat materi, moral dan spiritual secara langsung dan tidak langsung. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah- mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abd Qohar, M.Si selaku ketua Prodi, Pemikiran Politik Islam serta Ibu Citra Wahyuni.M,S.i selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Agustamsyah, M.I.P selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses perkuliahan.

7. Bapak Dios Moro selaku Pj. Kepala Pekon Banjar agung Kecamatan Gunung Alip kabupatrn Tanggamus yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian
8. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman seperjuangan di perantauan terutama kepada Edi, Raka, Lalang, Gio, Candra, Nabila atas segala bantuan yang mereka berikan, sehingga skripsi ku dapat menjadi awal kesuksesan ku.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam angkatan 2017 terutama yang telah memberikan ruang diskusi, dukungan, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjutnya dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan rahmat dan karunianya dan membalas kebaikan darisemua pihak yang telag membantuk penyelesaian skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabatakatuh

Bandar Lampung, April 2023

Penulis,

Edo Defrian Ramadhon

NPM 1731040068

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
LEMBAR PERSETUJUAN	ix
LEMBAR PENGESAHAN	x
MOTTO	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
I. Metode Penelitian	9
J. Kerangka Teoritik	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Kapasitas	21
1. Pengertian Kapasitas	21
2. Pengembangan Kapasitas	22
3. Tujuan Pengembangan Kapasitas	25
B. Pemerintahan Desa.....	28
C. Sistem Informasi Desa	31
1. Pengertian Sistem Informasi Desa	31
2. Manfaat Aplikasi Sistem Informasi Desa	35

3. Prinsip Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa.....	38
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian	41
1. Sejarah Pekon Banjar Agung	41
2. Keadaan Demografis	42
3. Visi dan Misi Pekon Banjar Agung	42
4. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Pekon Banjar Agung	44
5. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Pekon Banjar Agung	45
B. Kapasitas Aparatur Pemerintah Pekon Banjar Agung	49
1. Aparatur Pemerintah Pekon Banjar Agung	49
2. Kapasitas Aparatur Pemerintah Pekon Banjar Agung	54

BAB IV ANALISA DATA

A. Sumber Daya Manusia	61
B. Pelatihan	67
C. Keterampilan.....	74
D. Sarana Dan Prasarana	78
E. Penyampaian Informasi	82

BAB V KESIMPULAN

A. Simpulan	91
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk memudahkan dalam memahami dari judul yang akan diteliti, terlebih dahulu akan dijelaskan makna dari judul yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA (*Sudi di Pekon Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus*).

Kapasitas adalah : kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran (*output*) persatuan waktu.¹ Makna kapasitas disini lazim digunakan untuk menyatakan kemampuan sebuah fasilitas jasa pelayanan, dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Pemerintahan desa adalah : penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-undangan yang diserahkan kepada desa. Di kabupaten Tanggamus sebutan desa diganti dengan sebutan Pekon, sesuai dengan instruksi Bupati Tanggamus bahwa penyebutan desa diganti dengan sebutan pekon.

Sistem Informasi Desa (SID) bisa diartikan sebagai aplikasi dan proses berbasis komputer untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kantor desa, mendukung tugas dan fungsi kantor desa, terkait administrasi kependudukan, pelaporan, perencanaan,

¹ Antarikso, dkk, *Manajemen Produksi/Operasi Modern*, Jilid 1 Edisi 7 (Jakarta: Erlangga, 1994), 8

² C.S.T Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 58

pengelolaan aset, layanan publik, pengelolaan anggaran, dan lain sebagainya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang penulis maksud dalam judul tersebut diatas adalah kemapunan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah pekon dalam upaya mengelola sistem informasi yang ada di pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan tersedianya informasi merupakan kebutuhan mendasar di era sekarang ini baik sebagai individu maupun bagi setiap organisasi dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari semakin pesat perubahan yang sedemikian kompleks. Sistem informasi yang digunakan berfokus pada sistem informasi berbasis komputer (*computerbased information system*) dengan tujuan : informasi yang di hasilkan tersebut dapat lebih akurat, berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini juga sangat perlu diterapkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintah sistem pemerintah di Indonesia sebagai organisasi formal yang memiliki peran terhadap dalam konteks berbangsa dan bernegara baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good goverment*).

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 86 tentang sistem informasi desa disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Pada pasal 82 dan 86 terdapat beberapa kelengkapan penerapan pasal tersebut antara lain internet jaringan internet Desa, situs Web Desa, sistem informasi Desa, kantor elektronik (*E-office*), dan sosial media, kelengkapan pasal 86 membantu masyarakat agar dapat mengakses informasi melalui sistem informasi desa dan kelengkapan undang-undang, juga untuk memberi penguatan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat sehubungan dengan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di desa serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan desa itu sendiri sebagai media publikasi serta penyebarluasan informasi potensi desa secara terbuka kepada

masyarakat, meningkatkan pelayanan administrasi publik secara cepat, hemat waktu dan hemat anggaran, Sebagai media untuk menyampaikan aspirasi, permasalahan dan hasil pelaksanaan sistem informasi kepada pemerintahan dengan cepat, serta memudahkan investor dan pelaku usaha untuk investasi, memasarkan usaha masyarakat melalui konten iklan desa dengan terarah dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Hadirnya undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas pengakuan akan keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang ingin dimiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur tentang Desa mempertegas pengakuan akan keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang ingin dimiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bahwa dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bahwa desa desa merupakan basis kekuatan penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki melengkapi empat bidang utama, yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan penyelenggaraan masyarakat desa, yang dilakukan mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Kewenangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan desa semata, melainkan juga kebutuhan peran aktif seluruh komponen yang ada di pekon termasuk masyarakat.

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari sekretaris pekon bapak Ferli, bahwa di pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus, merupakan salah satu pekon yang hingga saat ini belum memiliki kelengkapan fasilitas penunjang dalam memberikan pelayanan melalui Sistem Informasi Desa (SID), seperti jaringan internet pekon dan unit komputer yang sesuai spesifikasinya ,

hal ini dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan pekon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Ketersediaan fasilitas penunjang sistem informasi di Pekon Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, juga mempengaruhi pengelolaan data pekon. Pengelolaan data pekon secara manual tidak mampu mengimbangi arus perubahan yang begitu pesat dalam segala aspek, baik dalam lingkungan pekon itu sendiri, maupun dalam lingkungan yang lebih luas di luar pekon, sehingga upaya untuk memetakan potensi yang menjadi kekuasaan pekon menjadi terbengkalai dan tidak optimal, dengan demikian tentunya akan sulit untuk menghadapi tantangan dan ancaman masa depan.

Di era modern seperti ini, dimana masyarakat dituntut untuk bisa mengetahui dan mengerti perkembangan tentang pentingnya teknologi yang ada. Kemajuan teknologi dapat memudahkan setiap kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya pada bidang pemerintahan (*E-government*). Adanya suatu penyampaian informasi menggunakan sebuah aplikasi berbasis web akan lebih mudah dalam menerapkan *e-government*. Pada saat ini pekon Banjar Agung masih menggunakan sistem manual yang pada akhirnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap saat, sehingga banyak sekali informasi yang tidak diketahui. Untuk meningkatkan kualitas suatu layanan data dan informasi, sebuah aplikasi website sangatlah dibutuhkan. Mengacu pada hal tersebut, maka diharapkan menggunakan Sistem informasi berbasis *webbsite* dengan tujuan agar dapat mempublikasikan ke masyarakat luas serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan setiap saat hanya dengan menggunakan komputer yang sudah terkoneksi oleh internet.

Seperti halnya pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik harus dapat memberikan kinerja yang baik untuk masyarakatnya, misalnya pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar masyarakat merasakan kepuasan dalam menerima pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik di negara ini menjadi salah satu permasalahan publik.

Berdasarkan pra observasi yang penulis lakukan di lapangan, sebagai penyelenggara pemerintahan pekon, khususnya aparatur pekon di Banjar Agung belum mampu memiliki pemahaman, keterampilan serta kemampuan dalam memberikan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh warga masyarakatnya dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya faktor utama yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusianya. Meskipun sering dilaksanakan pelatihan terhadap aparatur pemerintahan pekon, jika sumber daya manusia tidak cakap, dalam hal ini kurang memiliki pemahaman dengan aplikasi, tentu saja hal yang diharapkan dari pelatihan tersebut akan menjadi sia-sia saja. Oleh karena itu Sumber daya manusia menempati urutan pertama dalam keberhasilan suatu pekerjaan, disamping usia para aparatur pekon yang ada masih muda dan termasuk usia yang sangat produktif.

Sampai dengan saat ini pekon Banjar Agung, kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, aparatur pemerintah pekonnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola secara mandiri Sistem Informasi Desa.³ Penginputan data-data yang diwajibkan oleh kementerian desa berkaitan dengan penggunaan penyelenggaraan dana desa baik yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) masih dilakukan penginputan oleh tenaga pendamping pekon yang ada di wilayah kecamatan Gunung Alip. Artinya bahwa, aparatur pemerintah pekon hanya sebatas memberikan dokumen atau catatan saja, tanpa menginput data tersebut ke dalam *websites* resmi Kementerian Desa.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan sumber daya manusia aparatur pemerintah pekon dalam mengelola sistem informasi desa yang kemudian penulis paparkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Banyak terdapat kemungkinan data-data yang telah dimiliki oleh pekon yang dibuat secara manual (seperti data penduduk) menjadi tercecer atau tidak terkelompokan dengan baik,

³ Ferli Hanzar Saputra, "Sistem Informasi Desa", *Wawancara*, Juni 9, 2021.

baik dari segi fisik dokumennya, maupun data-data detail dari tiap-tiap data penduduk yang dimaksud. Oleh karena itu diperlukan upaya yang nyata dalam menyusun data tersebut menjadi lebih baik dan tersusun serta mudah diakses oleh masyarakat secara umum.

D. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan beberapa fokus dan subfokus penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kapasitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan pekon.
- b. Ketersediaan alat penunjang yang dimiliki oleh pekon semestinya dapat dimanfaatkan dengan baik, supaya segala macam informasi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dapat tersedia dan dapat mudah diakses kapan dan dimanapun berada.

E. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“ Bagaimana kapasitas aparatur pemerintah pekon dalam mengelola sistem informasi desa di pekon Banjar Agung ?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kapasitas aparatur pemerintah pekon Banjar Agung dalam hal pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis internet terhadap masyarakat pekon pada khususnya dan pihak lain pada umumnya.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan Sistem

Informasi Desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bermanfaat bagi pemerintahan pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip, kabupaten Tanggamus, dalam mengevaluasi kinerja dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah pekonnya dalam menyediakan pelayanan terbaik kepada warga masyarakatnya.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

1. Skripsi dengan judul Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Pagerharjo, kecamatan Samigaluh, kabupaten Kulon Progo yang ditulis oleh Makelon Selepole, dalam penelitiannya didapatkan bahwa Kepala Desa selaku pemimpin (*leadership*) dapat mengorganisir aparatur pelaksana dibawahnya, yaitu sekretaris desa, kepala seksi, permusyawaratan desa kepala seksi Badan Pemerintah Desa Kepala seksi umum serta staf administrasi desa dan Kaur Perencanaan dan terkait, dengan mengembangkan kapasitas guna mendistribusikan kewenangannya sesuai bidang tugas dan cakupan wilayah pelayanan yang dimiliki, namun jika dilihat dari realitas dilapangan, pengelolaan Sistem Informasi Desa belum berjalan secara maksimal karena sistem informasi desa bisa meningkatkan untuk kualitas pengelolaan dilaksanakan melalui internet Pemerintah Desa, melalui pengelolaan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa masih di akomodir oleh Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah Desa mengalami kendala dalam pengembangan kapasitas sistem informasi desa.
2. Jurnal yang ditulis oleh Rima Adhi Hapsari dengan judul Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimisasi

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di desa Ngimbrang kecamatan Bulu kabupaten Temanggung) yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan pada Pemerintah Desa Ngimbrang belum berjalan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat aparat yang kurang paham dalam menggunakan komputer dan aplikasi pelayanan kependudukan, selain itu masih kurangnya kedisiplinan aparat dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka, diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur desa dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam rangka membantu adaptasi dan proses dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem komputer ini, diperlukan adanya pengembangan kapasitas SDM aparat Pemerintah Desa Ngimbrang dengan menggunakan model pengembangan kapasitas SDM Grindle dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan.

3. Skripsi dengan judul Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di desa Dadapayu, kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ditulis oleh Ben Makewa Pigai, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta tahun 2020. Dari hasil penelitian, sudah menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi desa di Desa Dadapayu sudah baik hanya saja dalam pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan internet/jaringan di desa dadapayu belum maksimal, hal ini terbukti bahwa sistem informasi desa dalam mengupdate perkembangan di desa belum maksimal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah pengelolaan sistem informasi desa, yaitu melibatkan semua perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan sistem informasi desa, dengan maksud agar semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan sistem informasi desa. Harapan kepada Pemerintah Desa Dadapayu agar tetap konsisten dalam melaksanakan pelayanan

administrasi terutama sistem informasi desa kepada masyarakat dengan lebih transparan kepada masyarakat

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah lebih berfokus kepada sumber daya pelaksana dari penyampaian sistem informasi desa tersebut, yaitu aparatur pemerintah desanya dalam hal ini adalah operator pemerintah desa yang bertugas untuk membuat, menyampaikan dan mempublikasikan informasi desa terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya dalam hal ini masyarakat desa pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Burhan Bungin, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi suatu objek penelitian, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau variabel tertentu.⁴

Peneliti akan berusaha untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi yang berkaitan. Sedangkan apabila ditinjau dari objek yang akan diteliti, penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (*field research*),⁵ dimana peneliti akan turun secara langsung untuk melakukan penelitian mengenai kapasitas implementasi pelaksanaan sistem informasi oleh perangkat desa di pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 48.

⁵ Penelitian lapangan (*field research*) adalah salah satu jenis penelitian terapan yang memfokuskan diri berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usaha mengumpulkan data dan berbagai informasi. Lihat Hadari Nawawi dkk, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 24.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu : penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang pelaksanaan sistem informasi desa oleh aparatur pekon di Pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus.⁶

2. Sumber data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari Kepala pekon, Sekretaris pekon, Kepala Urusan (Kaur) serta tokoh masyarakat yang ada di pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus. Untuk itu yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang berupa catatan lapangan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti terhadap objek dan subjek penelitian dimaksud.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang penulis maksud dalam penelitian ini data yang terdapat di dalam pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus, seperti data umum pekon, keadaan masyarakat pekon dan lain sebagainya.

3. Pengumpulan data

a. Wawancara/Interview

Interview adalah komunikasi antara dua orang, dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan

⁶ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007),44.

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁷Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang sifatnya bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data yang diperlukan. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸

Sedangkan pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

TABEL. 1
PEDOMAN WAWANCARA

N O	Indikator	Data Yang Dibutuhkan	Informan
1.	Sumber Daya Manusia	1. Bagaimana Sumber daya manusia yang dimiliki aparat pemerintah pekan? 2. Apakah ada pembagian tugas berdasarkan bakat atau keahlian yang dimiliki	1. Herdiyansyah 2. Riko Desvanrori Abkim

⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 235

2	Pelatihan	<p>3. Apakah aparat pemerintah pekon telah mengikuti pelatihan aparatur ?</p> <p>4. Bagaimana kapasitas aparatur pekon setelah mengikuti pelatihan?</p>	<p>1. Dias Moro</p> <p>2. Muhammad Dimiyati</p> <p>3. Recky Wijaya</p>
3	Keterampilan dan Keahlian	<p>5. Bagaimana menurut anda dengan munculnya Sistem Informasi Desa?</p> <p>6. Bagaimana peran aparat pemerintah pekon dalam pemanfaatan sistem informasi desa?</p>	Ferli Hanzar Saputra
4	Sarana dan prasarana	7. Bagaimana sarana yang yang	<p>1. Dias Moro</p> <p>2. Ferli Hanzar Saputra</p>

		<p>dimiliki oleh pekon pada saat ini dalam mendukung kelengkapan sistem informasi desa?</p> <p>8. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem informasi desa?</p>	
5	Penyampaian informasi	9. Apa yang dilakukan pemerintahan pekon dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat?	<p>1. Mustain</p> <p>2. Hafifi</p>

b. Observasi

Nasution dalam Sugiyono mengatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui

observasi.⁹ Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kapasitas yang dimiliki oleh aparat pemerintah pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus dalam menyelenggarakan sistem informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya sesaat dari seseorang.¹⁰ Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari interview dan observasi agar tidak diragukan validasinya. Data tersebut bisa berupa dokumen kegiatan berbentuk diktat, photo maupun dokumen lain yang dibutuhkan

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu aparatur pemerintahan pekon dan masyarakat yang ada di pekon Banjar Agung kecamatan Gunung Alip kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Penulis dalam menentukan sampel, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu

⁹ *Ibid*, 226

¹⁰ *Ibid*, 240

¹¹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 118.

“pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan apabila subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar maka diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹² Berdasarkan pendapat diatas, dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 orang, yaitu sebanyak 8 orang saja, maka semuanya dijadikan sampel dalam penelitian ini.

TABEL. 2
DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN

NO	Nama	Jabatan	Ket
1	Dias Moro	Pj.Kepala Pekon	
2	Ferli Hanzar	Sekretaris Pekon	
3	Riko Desvanrori Abkim	Kaur Tata Usaha	
4	Recky Wijaya	Kaur Perencanaan	
5	Herdiyansyah	Kaur Pemerintahan	
6	Muhammad Dimyati	Kasi Pelayanan	
7	Mustain	Tokoh Masyarakat	
8	M. Hafifi	Tokoh Masyarakat	

5. Pengolahan Data

Adapun yang penulis lakukan dalam hal pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data berdasarkan jenis dan sumber datanya terlebih dahulu. Setelah itu melakukan pengelompokan dan penyajian data baik yang berdasarkan teori maupun yang berdasarkan penelitian atau

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 131

temuan di lapangan. Hasil penelitian di lapangan selanjutnya akan di kaji kembali berdasarkan teori dan kajian yang ada.

6. Analisa Data

Setelah data informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data dalam pola, kategori dan satuan urian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Salim dan Syahrudin mengutip dari *Bogdan* dan *Biklend* menjelaskan bahwa analisis data adalah : proses dan mencari, mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lain yang telah dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain. Data yang telah diorganisasikan kedalam suatu pola dan membuat kategorinya. Maka data diolah menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman*.¹³

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

b. Penyajian data

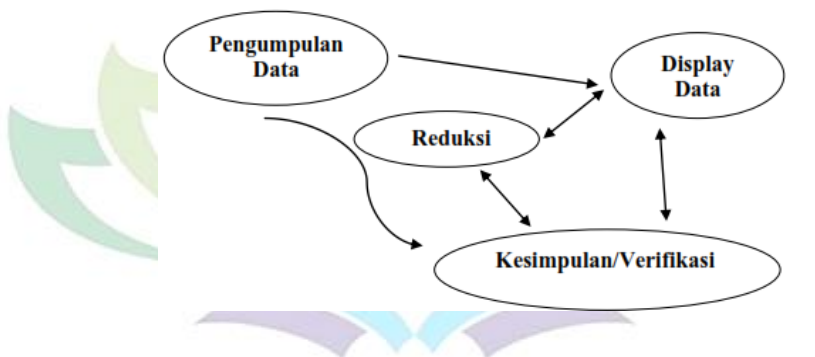
Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu

¹³ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 147-150.

bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, tetap terbuka dan belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar lebih kokoh seiring bertambahnya data sehingga kesimpulan menjadi suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan final akan didapatkan seiring bertambahnya data sehingga kesimpulan menjadi suatu konfigurasi yang utuh.



Gambar. 01

Tahapan Alur Penelitian

J. Kerangka Teoritik

a. Kapasitas

Menurut Morgan dalam Soeprapto, kapasitas adalah : kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke

waktu”.¹⁴ Lebih lanjut *Brown* dalam Soeprpto mendefinisikan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, serta berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Kapasitas dapat di ukur dengan tiga indikator yaitu pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

b. Pemerintah Desa

Menurut Istianto mendefinisikan pemerintah adalah : merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara.¹⁵ Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar

Wastiono dan Tahir mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.¹⁶

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

¹⁴ Soeprpto, Riyadi. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, (Word Bank. 2010),10

¹⁵ Istianto, Bambang, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), 25

¹⁶ Wasistiono, Sadu, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung : CV. Fokusmedia, 2006), 10

pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Lebih lanjutnya Nurcholis menyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 - (1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - (2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pemerintahan, kesejahteraan dan lain-lain;
 - (3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁷

c. Sistem Informasi

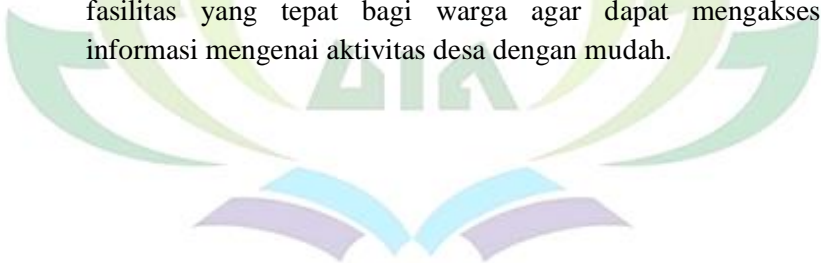
Sistem Informasi secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali. Informasi berarti data yang lebih dibentuk ke dalam suatu format yang mempunyai arti dan berguna bagi manusia. Sebaliknya data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan digunakan orang. Input mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal. Output mengalihkan informasi yang diproses kepada orang-orang yang akan menggunakannya atau kepada aktivitas yang membutuhkannya.¹⁸

¹⁷ Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta : Erlangga, 2011) , 73

¹⁸ Laudon C. Kenneth dan Laudon P. Jan, *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi 8 (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005) h. 5

Sistem Informasi Desa (SID) bisa diartikan sebagai aplikasi dan proses berbasis komputer untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kantor desa, mendukung tugas dan fungsi kantor desa, terkait administrasi kependudukan, pelaporan, perencanaan, pengelolaan aset, layanan publik, pengelolaan anggaran, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas, jenis aplikasi informasi desa yang tercakup pada Sistem Informasi Desa dalam suatu desa sendiri bisa terdiri dari beberapa aplikasi, seperti Open SID sebagai aplikasi untuk pengelolaan data mengenai kependudukan, BUMDes, SISKEUDES untuk pengelolaan keuangan desa, dan lain sebagainya. Melalui Sistem Informasi Desa (SID), perencanaan, informasi kependudukan, anggaran, aset dan sebagainya bisa langsung terekam lewat sistem elektronik. Seluruh informasi tersebut memiliki potensi lebih gampang diakses oleh masyarakat. Kantor desa memiliki kesempatan dalam menyediakan fasilitas yang tepat bagi warga agar dapat mengakses informasi mengenai aktivitas desa dengan mudah.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Kapasitas

1. Pengertian Kapasitas

Menurut Brown dalam Soeprapto, mendefinisikan : “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuantujuan yang dicita-citakan”. Sedangkan menurut Morgan, “kapasitas diartikan sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”¹⁹.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kapasitas merupakan tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu, jika tidak dilandasi dengan kapasitas yang memadai maka tidak akan mampu untuk berproduksi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, serta berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Kapasitas dapat di ukur dengan tiga indikator yaitu pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

¹⁹ Soeprapto, Riyadi, *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, (Word Ban, 2010), 9-10

2. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Setiap orang pasti membutuhkan kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik itu didalam organisasi maupun secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan bagi seorang individu diharapkan selalu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas. Banyak cara yang dilakukan untuk dapat meningkat kapasitas tersebut. pengembangan kapasitas adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsifitas dari kinerja. pengembangan kapasitas adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam perkembangannya, sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi karena *capacity building* merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam. Menurut Sedarmayanti, menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap.

20

Senada dengan pendapat Yuniarsih dan Suwanto menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan bagi karyawan, program pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja mereka dalam

²⁰ Sedarmayanti, *Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), 163

pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang.²¹

Soeprapto dan Madiyono mengemukakan bahwa : pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkatan individu, contohnya keterampilan-keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.
- b. Tingkatan organisasi, contohnya struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan didalam organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi.
- c. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.²²

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia itu sendiri. Suatu program pendidikan dan pelatihan hanya dapat dikatakan efektif dan efisien apabila terjadi perubahan yang relatif permanen bukan hanya dalam diri peserta pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga dalam diri para pengguna tenaga kerja yang dididik dan dilatih serta perubahan dalam cara kerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa kapasitas adalah suatu kemampuan.

²¹ Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 40

²² Jurnal Madiyono, “ Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kec.Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa, Imam , 2016. 21

Sedangkan pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah : usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kemampuan baik dalam organisasi, aparatur (sumber daya manusia) dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Konteks pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Menurut Notoatmodjo pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia atau aparatur desa yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut.
- b. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu organisasi atau instansi.
- c. Promosi dalam suatu organisasi atau instansi adalah suatu keharusan apabila organisasi itu mau berkembang.²³

Menghasilkan sumber daya manusia atau aparatur pekon yang efektif dan efisiensi dan agar pengembangan sumber daya manusia di pekon lebih mengenai sasaran, maka dalam *capacity building* perlu diperhatikan empat fase dasar yang akan dilalui, menurut Grindle dalam Djumdi yaitu :

- a. Fase desain (*a design phase*), meliputi keterlibatan pihak-pihak tertentu yang bisa menghasilkan masukan (*resulting in*) bagi strategi pengembangan sumber daya manusia, baik dari dalam maupun luar lembaga pemerintahan desa misalnya, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum dan keuangan, dan kepala BPD.

²³ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 17

- b. Fase implementasi proyek (*project implementation phase*) dimana menyeleksi kontraktor pelaksana atau unit-unit administrasi tertentu untuk memulai dan mengimplementasikan suatu program.
- c. Fase akuisisi kemampuan (*a acquisition phase*), dari berbagai kegiatan informal yang didapat akan membentuk keahlian-keahlian baru termasuk mengasah wawasan, bakat, potensi, dan etos kerja.
- d. Fase pencapaian atau kinerja (*performance phase*) dimana kemampuan individu akan termanifestasikan dalam peralihan tugas dan hasil evaluasi akhir. Hal ini yang perlu diperhitungkan dari setiap fase-fase tersebut adalah adanya pengaruh lain berupa kejadian-kejadian yang mungkin tidak bertalian dengan program misalnya, rotasi jabatan, perubahan politik, konflik sosial, dan sebagainya, yang seringkali menyebabkan program pengembangan sumber daya manusia terkesan serba instan dan mengalami stagnasi.²⁴

3. Tujuan Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Menurut Morrison bahwa *capacity building* (pengembangan kapasitas) adalah : serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja. Lebih lanjut Morrison juga menyatakan bahwa : *capacity building* adalah : pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.²⁵

Berdasarkan pendapat diatas, menunjukkan bahwa tujuan dari *capacity building* (pengembangan kapasitas) dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

²⁴ Jurnal Djumdi, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Tataan Pemerintah yang Baik (Jurnal sosial-politik 2006). Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman. Samarinda.

²⁵ Tarance Morrison, *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, (ADB Institute, 2001), 23

- a. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem.
- b. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek :
 - 1) Efisiensi dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*.
 - 2) Efektifitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
 - 3) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
 - 4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.²⁶

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Namun secara khusus Soeprapto mengemukakan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut :

a. Komitmen bersama.

Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauhmana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.

²⁶ Yeremias. T. Keban. *Good Governance dan Capacity Building, sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian*, (Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta: 2000), 7

b. Kepemimpinan.

Faktor *conducive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

c. Reformasi Peraturan.

Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.

d. Reformasi Kelembagaan.

Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini

harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.²⁷

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa.

Menurut Istianto, konsep pemerintah didefinisikan : sebagai suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara.²⁹ Wasistiono dan Tahir mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan

²⁷ Soeprapto Riyadi, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume IV (1), (Malang : FIA UNIBRAW, 2006), 20

²⁸ C.S.T Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 58

²⁹ Istianto, Bambang, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2009), 25

politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³⁰

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Nurcholis menyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu : kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.³¹

³⁰ Wasistiono, Sadu, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung : CV. Fokus Media, 2006), 10

³¹ Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), 73

Di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2, 3 dan 4 yang berbunyi:

- a. Ayat 2 berbunyi : Pemerintahan Desa adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Ayat 3 berbunyi : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Ayat 4 berbunyi : Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang desa dijelaskan pula bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa sangatlah penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan

Keberadaan perangkat desa yang juga disertai tugas di bidang pemerintahan menempati tempat yang sangat penting, karena sebagai instansi pemerintahan terendah, mereka sangat mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di daerah. Desa sering digunakan untuk perencanaan wilayah, sehingga data buatan atau data informasi harus dihindari karena akan menghambat tujuan negara.” Semakin membutuhkan kerja keras dan kemampuan yang lebih baik

untuk mendorong kepatuhan terhadap tanggung jawab pemerintah.

C. Sistem Informasi Desa

1. Pengertian Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa yang pada awalnya disebut SIDESA hingga akhirnya menjadi SID memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumberdaya yang ada di komunitas.

Sistem informasi ini dibangun dengan berbasis komputer dan website sehingga informasi ini dapat diakses oleh warga. SID dirancang untuk menyajikan informasi dan tentunya dapat membantu pelayanan sektor publik. Salah satu yang dapat diimplementasikan, yakni pelayanan kependudukan. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86.³² Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat Sistem Informasi Desa (SID) menjadi penting perannya. Karena itu perlu dikembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang sesuai dengan visi Undang-Undang Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya Sistem

³² <https://www.panda.id/sistem-informasi-desa/> diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2022 pukul 19.00 WIB.

Informasi Desa (SID) diatur khusus dalam Undang-Undang Desa melalui Pasal 86. Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota setidaknya menjawab kebutuhan yang terkait dengan data desa, sehingga desa menjadi bersuara. Sistem Informasi Desa (SID) diharapkan dapat mempunyai data dan informasi yang berkualitas, komprehensif, dan terintegrasi.³³

Sebenarnya himbauan agar desa/pekon yang ada di provinsi Lampung menggunakan program melalui dukungan teknologi dan informasi tercantum dalam peraturan Gubernur Lampung: 36 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan smart village provinsi lampung 2020-2024. Smart village adalah: program/kegiatan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan akuntabel melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang diarahkan kepada upaya peningkatan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi administrasi desa dan partisipasi, masyarakat desa atau e-participation. Dikarenakan dalam peraturan Gubernur tersebut hanya ditujukan kepada beberapa desa saja di provinsi Lampung dan merupakan perwakilan dari tiap kabupaten, maka di kabupaten tanggamus hanya beberapa desa/pekon yang menggunakannya seperti pekon Purwodadi kecamatan tanggamus hanya beberapa desa/pekon yang menggunakannya seperti pekon puwodadi kecamatan Gisting dan pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang padang.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa terdapat 6 Ayat:

³³ Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015), 331

- a. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- d. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Penjelasan dari Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanyaan diatas cukup beralasan, karena disatu sisi SID dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Disaat yang lain, Desa juga masih dibebani tanggung jawab untuk mengisi berbagai sistem informasi serupa SID yang masih berlaku, sehingga perlu kita pertimbangkan kesiapan aparatur desa (ketersediaan dan kualifikasi personil) untuk memenuhi tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus dimutakhirkan (update) dan kualifikasi personil) untuk memenuhi

tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus dimutakhirkan (*update*).

Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan SID yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah/pemerintah daerah wajib mengembangkan system informasi dengan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Sistem Informasi Desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang ada di dalam Sistem Informasi Desa (SID), yaitu :

- a. Basis data kependudukan, meliputi data dasar keluarga (13 informasi dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll).
- b. Informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya.
- c. Basis data sumber daya desa, memuat data tentang potensi desa.
- d. Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi keluarga sejahtera (kaya,

sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat desa/kelurahan.

- e. Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan.

Ada 4 hal yang mendorong lahirnya Sistem Informasi Desa (SID), yaitu :

- a. Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital, tidak lain langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkannya dari kertas menjadi format digital yang tersimpan di dalam komputer.
- b. Adanya suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa lainnya secara cepat dan tepat.
- c. Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (open source) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa.
- d. Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu.³⁴

2. Manfaat Aplikasi Sistem Informasi Desa

Setiap aplikasi Sistem yang dibuat oleh pemerintah pada umumnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Termasuk adanya Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Berikut ini dijelaskan secara

³⁴ Ranggoaini Jahja dkk, Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD), 2014), hal.1-2

singkat beberapa manfaat Sistem Informasi Desa (SID) menurut pengertian di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengelolaan data desa pengelolaan data desa seperti data kependudukan, sarana dan prasarana, anggaran desa, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain cepat dan mudah, dengan menggunakan aplikasi SID data desa dapat disimpan dengan aman didalam sistem dan lebih mudah dalam pencarian data menggunakan fitur pencarian yang disediakan aplikasi.
- b. Mempercepat pelayanan desa Pelayanan administrasi desa konvensional sangat menyita waktu. Aplikasi SID yang dibangun dengan baik dapat mempercepat waktu pelayanan desa.
- c. Memanfaatkan data desa Desa dapat memanfaatkan data yang terdapat dalam sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, perencanaan dan pembangunan ditingkat kabupaten atau kawasan, serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri oleh komunitas atau warga desa.
- d. Transparasi pemerintah desa.
Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewajiban transparasi desa dengan memanfaatkan website desa yang terintegrasi dengan aplikasi SID sebagai media keterbukaan informasi desa. Warga juga dapat ikut memantau informasi yang desa umumkan melalui website resmi desa. Dengan SID, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai SID untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan pengumuman, dan sebagainya.
- e. Kantor desa lebih efisien Misalnya dengan memakai SID, kantor desa dapat menyediakan layanan surat

keterangan pada warga jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Dengan SID, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung.

- f. Kantor desa lebih efektif Sebagai contoh, karena SID menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.
- g. Pemerintah Desa lebih akuntabel Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dan sebagainya di dalam SID yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan, penggunaan dana desa dan sebagainya.
- h. Layanan publik lebih baik Dengan SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.
- i. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa. Dengan adanya SID, informasi kependudukan, perencanaan, aset, anggaran dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan

menerbitkan informasi desa di web desa. Karena tahu dari data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.

- j. Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa.

Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar atau usulan elektronik.³⁵

3. Prinsip Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa

Prinsip Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain :

- a. Sistem Informasi desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (open data);
- c. Sistem Informasi Desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.
- d. Penerapan Sistem informasi desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa;

³⁵ <https://github.com/opensid/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa> diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2022 pukul 19.30 WIB.

- e. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa.
- f. Standardisasi data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa.
- g. Penerapan teknologi tidak boleh ditunggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi.³⁶

Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Sedangkan yang menjadi tujuan dalam membangun Sistem Informasi Desa (SID) di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemetaan kondisi dan potensi desa (data akurat dan mutakhir)
- b. Untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
- c. Untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan desa.³⁷

³⁶ <http://www.keuandangesa.com/2015/05/memahami-sistem-informasi-dalam-konteks-uu-desa/> diakses pada hari Selasa, 29 Maret 2022

³⁷ <https://drive.google.com/file/d/0B7LNzEl-w45qYzdmQzIyUnFYbkU/view> diakses pada hari Kamis, 26 Marer 2022 Pukul 19.08 WIB



DAFTAR PUSTAKA

- Antarikso, dkk, *Manajemen Produksi / Operasi Modern*, Jilid 1 Edisi 7 (Jakarta: Erlangga, 1994)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- C.S.T Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004)
- Istianto, Bambang, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2009)
- Laudon C. Kenneth dan Laudon P. Jan, *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi 8 (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005)
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004)
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta : Erlangga, 2011) (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996)
- Salim dan Syahrurn, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Cipta Pustaka Media, 2012)

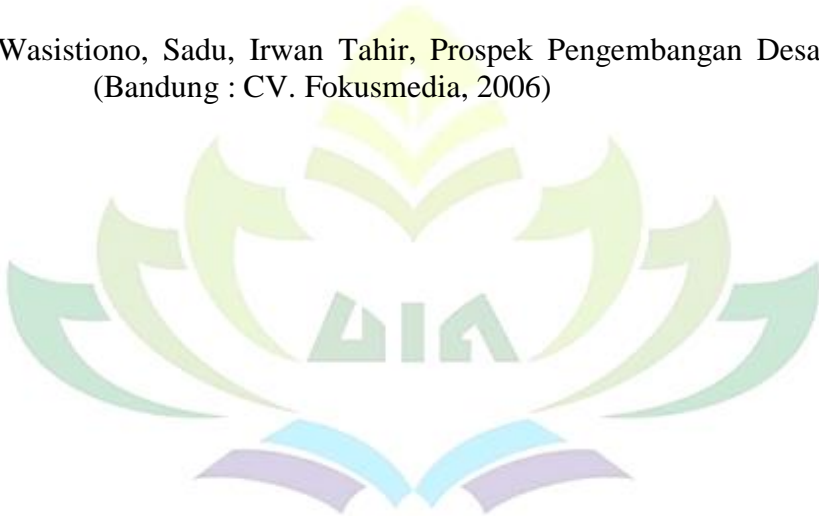
Soeprapto, Riyadi. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, (Word bank. 2010)

Subarsono, Analisis kebijakan publik, (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2009)

Sugiyono, ***Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D***, (Bandung : Alfabeta, 2015)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Wasistiono, Sadu, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung : CV. Fokusmedia, 2006)



DOKUMENTASI WAWANCARA





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0373/Un.16 / P1 /KT/V/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA
(Studi di Pekon Banjar Agung, Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
EDO DEFRIAN RAMADHON	1731040068	FUSA/ PPI

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan di **Fakultas/ Prodi** dengan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
3	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ut.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
8	www.jogloabang.com Internet Source	1%
9	pascasarjanafe.untan.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
11	jurnal.unismabekasi.ac.id Internet Source	<1 %
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
14	ppid.jogjapro.go.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
17	www.simpeldesa.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
19	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	<1 %
21	repository.uin-suska.ac.id	

Internet Source

<1 %

22

repository.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

23

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

24

Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa
Jurai

Student Paper

<1 %

25

ejournal.poliban.ac.id

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

27

Submitted to Universitas Amikom

Student Paper

<1 %

28

repository.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

29

documents.tips

Internet Source

<1 %

30

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

31

journal.unjani.ac.id

Internet Source

<1 %

32

lampung.idntimes.com

Internet Source

<1 %

33

repositori.iain-bone.ac.id

Internet Source

<1 %

34

repository.bsi.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

36

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

37

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

38

Submitted to SDM Universitas Gadjah Mada

Student Paper

<1 %

39

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

40

Dwi Putra Githa, Duman Care Khrisne, I Made Ardwi Pradnyana. "Rancang Bangun Sistem Pencatatan Portofolio untuk Evaluasi Kinerja Dosen pada STMIK STIKOM Indonesia", S@CIES, 2014

Publication

<1 %

41

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

42

Internet Source

<1 %

43

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

44

Submitted to Universitas Respati Indonesia

Student Paper

<1 %

45

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

46

e-campus.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1 %

47

informasikesehatanfkmunsri.blogspot.com

Internet Source

<1 %

48

journal.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

49

ppid.sultengprov.go.id

Internet Source

<1 %

50

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

51

docplayer.info

Internet Source

<1 %

52

irfiii.blogspot.com

Internet Source

<1 %

53

politeknikjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

54	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
55	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
56	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
57	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
58	aarizky.com Internet Source	<1 %
59	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
60	digilib.isi.ac.id Internet Source	<1 %
61	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
62	radentaufiq.wordpress.com Internet Source	<1 %
63	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
64	sariwangi.sideka.id Internet Source	<1 %

65	Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020 Publication	<1 %
66	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
67	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
68	www.scribd.com Internet Source	<1 %
69	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
70	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
71	premium.sinarharian.com.my Internet Source	<1 %
72	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On